

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa otonomi daerah itu adalah kewenangan daerah, otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pekei, 2016:16)

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. (Haryanto dkk, 2007:14)

Salah satu pilar utama kokohnya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan. Saat ini, masyarakat telah berada pada era keterbukaan, teknologi informasi dan komunikasi sudah demikian maju dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Dalam hal pengelolaan uang publik, masyarakat akan semakin cerdas untuk menuntut adanya transparansi. Terkait

dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. (Mahmudi, 2019:2-3)

Desentralisasi fiskal adalah kewenangan dari pemerintah daerah untuk mengatur pembelanjaan atau pengeluaran keuangan daerah dan bagaimana pemerintah daerah mengelola pendapatan daerah dalam rangka membiayai pengeluaran atau belanja daerah tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa “anggaran merupakan pedoman tindakan yang dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk periode tertentu”.

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*public fund*) melalui pajak daerah yang dibayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. (Haryanto dkk, 2007:91)

Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu Kabupaten di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur pembelanjaan atau pengeluaran keuangan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat mengoptimalkan proses otonomi daerah dengan cara mengalokasikan belanja daerah untuk kepentingan peningkatan pelayanan sektor publik. Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat untuk dinilai apakah anggarannya sudah direalisasikan dengan baik atau belum sesuai dengan program-program yang telah disusun. Pemerintah daerah membuat Laporan Realisasi Anggaran rutin setiap tahunnya sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja keuangan.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun 2016-2020

TAHUN	BELANJA	
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
2016	1.323.436.024.215,00	1.160.527.395.155,00
2017	1.198.046.353.093,00	1.381.985.274.860,00
2018	1.463.688.662.970,00	1.419.173.692.318,00
2019	1.538.807.155.681,00	1.554.158.811.037,00
2020	1.593.574.706.865,00	1.490.566.137.564,95

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa anggaran belanja daerah setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2016, 2018 dan tahun 2020 anggaran belanja daerah lebih besar daripada realisasinya. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten OKU telah menggunakan penyerapan anggaran sesuai rencana yang telah disusun. Tetapi pada tahun 2017 dan 2019 realisasi anggaran belanja daerah lebih besar daripada anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah kurang efisien dalam melaksanakan program yang telah disusun dan menyebabkan realisasi tidak sesuai dengan anggarannya.

Untuk menilai tingkat efisiensi dari penggunaan anggaran tidak dapat langsung dinyatakan dalam bentuk baik atau tidaknya. Untuk mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasinya terwujud dapat dilihat melalui seberapa besar pemenuhan pada belanja kegiatan yang digunakan oleh pemerintah menggunakan

analisis belanja daerah, yang meliputi analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan analisis efisiensi belanja.

Analisis varians belanja, yaitu analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Jika selisih terjadi menunjukkan pengeluaran aktual yang lebih kecil daripada jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran (*underspending*) maka berarti kinerja keuangan sebuah Satuan Kerja adalah baik. Sebaliknya, jika selisih yang terjadi menunjukkan pengeluaran aktual yang lebih besar daripada jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran (*overspending*) maka dapat dikatakan kinerja keuangan Satuan Kerja adalah buruk. Analisis pertumbuhan belanja, yaitu analisis yang bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis keserasian belanja, yaitu analisis yang bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja, salah satunya dengan menilai rasio belanja langsung dan rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja. Analisis efisiensi belanja, yaitu analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat penghematan yang dilakukan pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mengelola keuangan daerahnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Realisasi Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menggunakan anggaran belanja secara efisien selama tahun 2016-2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja dari tahun 2016-2020 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan serta sebagai sumber informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan realisasi anggaran belanja.

1.4.2 Manfaat Praktisi

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya tentang realisasi anggaran belanja pada pemerintah daerah.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi tambahan, masukan atau sebagai bahan pertimbangan pejabat pemerintah daerah untuk menganalisis realisasi anggaran belanja pemerintah daerah serta meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah